BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan

Kantor Pos pertama yang didirikan di Indonesia adalah di Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1746 oleh Gubernur Jenderal GW Van Wheff bersama dengan ditemukannya telegraf dan telepon yang disingkat PTT. Pada tahun 1764 Dinas Pos sebagai jawatan berada dibawah pengawasan *Directure Production On Avile Magazine Tahun.* Tahun 1875 dinas pos disatukan dengan dinas telegraf dan disebut *Post en Telegraf* Sejak tahun 1884 jawatan telepon disatukan sehingga mulai tahun 1906 disebut dengan *post telegraf en telepondients* (PTT). Pada tahun 1922 kantor pos pusat PTT yang semula di Wel Hevreden (Gambir – Jakarta) pindah ke gudang *Bungerlijke Openbabe Worken* (BOW) yang saat ini lebih dikenal denan dinas pekerjaan umum di Bandung.

Selama dalam pedudukan Jepang, jawatan PTT terpecah – pecah mengikuti struktur organisasi pemerintahan militer Jepang sehingga pada masa itu terdapat jawaban PTT swasta, Jawa, Sulawesi, dll. Sejak tanggal 17 Agustus 1945 diproklamasikan, penyerahan jawatan PTT dari tangan Jepang ke tangan pemerintah Republik Indonesia ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pada tanggal 27 September 1945 pemuda yang bergabung dalam angkatan muda PTI dengan gagah berani merebut kekuasaan sebagai Hari Bhakti Parpostel. Sebagai kepala jawatan PTT yang pertama adalah Mas Soeharto

didampingi oleh R. Pijar sebagai wakilnya, kemudian perkembangan selanjutnya jawatan PTT sebagai perusahaan Negara yang bersumber pada IBW (*Indesche Bedrjun Wef*) dinyatakan telah memenuhi syarat untuk dijadikan perusahaan negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang No 19 tahun 1966 yang menyatakan bahwa semua perusahaan yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Negara maupun karena nasionalisasi berdasarkan Undang – Undang Nomor 8 tahun 1928 menjadi perusahaan Negara.

Melihat perkembangan tersebut keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 240 tahun 1965 untuk menyatakan PN Postel dipisah menjadi PN Telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1965 dan PN Pos dan Giro dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1965.

Selanjutnya, sesuai dengan Undang – Undang Nomor 9 tahun 1964 yang menetapkan status BUMN menjadi perusahaan jawatan perusahaan Pos dan Giro berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1978. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1983 ditetapkan tata cara pengawasan dan pembinaan perusahaan jawatan, perusahaan umum, perusahaan persero, untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1978 yang mengatur tentang Perum Pos dan Giro dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1084, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1995 tanggal 27 Februari 1995 Perum Pos dan Giro berubah status menjadi PT Pos Indonesia (Persero) sejak tanggal 20 Juni 1995 dengan akta notaris Soetjipto, SH Nomor 117.

Visi dan Misi perusahaan sesuai dengan keputusan Didreksi Nomor 32/Dirut/2000 tentang penyempurnaan visi dan misi adalah sebagai berikut:

1. **Visi**

   "Pos Indonesia adalah penyedia jasa pos yang berbasis informasi dan bernilai tinggi bagi masyarakat diseluruh nusantara serta dapat berkompetisi dalam industri global"

2. **Misi**

   a. Mengelola perusahaan sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat dengan didukung oleh teknologi tepat guna dan sumber daya manusia yang profesional.

   b. Menyediakan layanan komunikasi, logistik, transaksi keuangan dan layanan pos lainnya yang memiliki nilai tambah tinggi bagi kepuasan pelanggan.

   c. Mengembangkan usaha yang memiliki daya saing kuat, baik di pasar domestik maupun di pasar global.

   d. Memberikan pelayanan untuk kemanfaatan umum yang menjangkau seluruh pelosok tanah air dengan perlakuan yang sama guna memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa serta memperat hubungan antar bangsa.

4.1.2 Struktur Organisasi PT Pos Indonesia

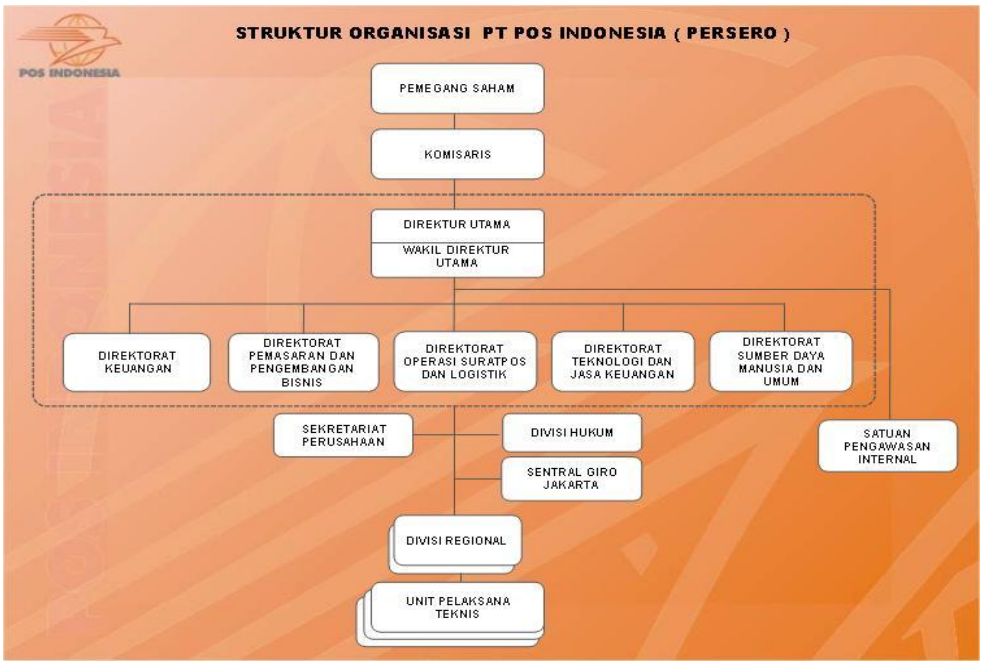
PT Pos Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di lingkungan Departemen Perhubungan, di pimpin oleh suatu direksi yang bertanggung jawab kepada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Bentuk

struktur yang digunakan PT Pos Indonesia (Persero) Bandung adalah bentuk *Line and Staf Organization* (Garis dan staf), bentuk ini biasanya digunakan pada perusahaan-perusahaan besar yang memiliki kesatuan perintah. Struktur organisasi PT Pos Indonesia (Persero) Bandung berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Pos Indonesia (Persero) Bandung Nomor 28A/DIRUT/ 1999 tentang organisasi, disusun dalam tiga tingkatan, yaitu tingkat pusat, tingkat daerah, dan tingkat unit pelaksana teknis.

Dalam melakukan penelitian ini penulis mengambil tempat di Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) Bandung sehingga informasi mengenai struktur organisasi dan deskripsi yang di jelaskan pada penelitian ini adalah informasi yang berkaitan dengan organisasi tingkat pusat PT Pos Indonesia (Persero) saja. Adapun organisasi tingkat pusat PT Pos Indonesia (Persero) terdiri atas :

1. Direksi
2. Direktorat Operasi
3. Direktorat perencanaan, Teknis dan Sarana
4. Direktorat Keuangan
5. Direktorat Sumber Daya Manusia
6. Satuan Pengawas Intern
7. Sekretariat Perusahaann
8. Pusat Penelitian dan Pengembangan

Struktur organisasi pada Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero) secara jelas dapat dilihat pada gambar berikut ini:



Gambar 4.1
Struktur Organisasi Kantor Pusat PT Pos Indonesia (Persero)
Sumber : PT Pos Indonesia (Persero)

4.1.3 Deskripsi Tugas

Uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari struktur organisasi tingkat pusat :

1. Direksi
   a. Memimpin, mengurus dan mengelola perusahaan sesuai dengan tujuan perusahaan serta senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan.
   b. Menyiapkan rencana jangka panjang serta rencana kerja dan anggaran tahunan perusahaan.
   c. Mengangkat dan memberhentikan pegawai perseroan sesuai dengan peraturan kepegawaian.

d. Menetapkan gaji, pensiun/jaminan hari tua dan penghasilan lain bagi para pegawai perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan.
e. Memberikan segala keterangan tentang keadaan dan jalannya perusahaan, baik dalam bentuk laporan tahunan, maupun laporan berkala menurut cara dan waktu yang telah ditentukan dalam anggaran dasar perusahaan.

2. Direktorat Operasi
   a. Membina dan mengendalikan kegiatan pelayanan jasa komunikasi, logistic serta jasa keuangan/keagenan dan filateli, baik untuk hubungan dalam negeri maupun luar negeri.
   b. Membina dan mengembangkan operasi pelayanan serta jaringan unit dan titik layanan.
   c. Mengendalikan dan mengelola kegiatan usaha bisnis pelayanan jasa.
   d. Menetapkan jaringan lalu lintas pos dan jaringan layanan serta kebijakan penetapan modal transportasi serta pengembagnag fasilitas fisik pelayanan.
3. Direktorat Perencanaan, Teknik dan Sarana
   a. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan perencanaan strategis serta pengelolaan dan pengolahan data
   b. Menetapkan kebijakan dan analisis kebutuhan teknologi dan sarana kebutuhan teknologi
   c. Menyelenggarakan kegiatan kesekretariatan Direktorat Perencanaan, Teknik dan Sarana.

4. Direktorat Keuangan
    a. Melakukan pengendalian keuangan perusahaan meliputi penetapan dan pengembangan kebijaksanaan sistem dan prosedur akuntansi keuangan anggaran dan investasi serta struktur biaya dan harga pokok industry.
    b. Melakukan pengelolaan keuangan melliputi penetapan pengembangan kebijaksanaan pengelolaan keuangan, pengelolaan kas dan pengendalian penyertaan modal karyawan.
5. Direktorat Sumber Daya Manusia
    a. Melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan pelatihan sumber daya manusia.
    b. Melakukan perencanaan dan pengembangan pengorganisasian dan sistem manajemen.
    c. Melakukan pengelolaan kesejahteraan.
6. Satua Pengawas Intern (SPI)
    a. Melakukan pemeriksaan, pengujian dan penilaian terhadap pengendalian manajemen, peningkatan pengekonomisan, keefesienan dan keefektifan.
    b. Melakukan pemeriksaan, pengjian dan penilaian terhadap pengolahan dan pertanggung jawaban keuangan serta kinerja usaha.
    c. Melakukan pengkoordinasian pengelolaan tugas pemeriksaan serta melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pengawasan intern.
7. Sekretaris Perusahaan
    a. Melakukan penyelenggaraan kesekretaritan Direktur Utama, Pengkoordinasian dan penyajian informasi perusahaan.

b. Melakukan penyelenggaraan hubungan masyarakat dan keprotokolan.
c. Melakukan penelahaan perundang-undangan, penanganan masalah hukum dan perikatan.
d. Melakukan penyelenggaraan hubungan kerjasama luar negeri/internasional.
e. Melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga kantor pusat.

8. Pusat Perencanaan dan Penelitian Terapan
   a. Melakukan penyelenggaraan dan/atau pengelolaan kegiatan penelitian terapan, baik dalam bidang opeerasi maupun non operasi yang tidak dapat memberikan manfaat yang layak bagi perusahaan guna menunjang keberhasilan perusahaan.
   b. Melakukan penyelenggaraan kerjasama teknik dan proyek.

PT Pos Indonesia (Persero) Bandung menggunakan sistem desentralisasi dalam hal struktur organisasi dan pendelegasian wewenang dalam perusahaan. Hal ini terlihat adanya direktorat-direktorat yang memegang kekuasaan dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama sehingga para karyawan yang berada dibawah kepemimpinan direktorat-direktorat tidak bertanggung jawab secara langsung kepada Direktur Utana, tetapi bertanggung jawab dan melaksanakan perintah dari direktur masing-masing.

4.1.4 Aspek Perusahaan PT Pos Indonesia (Persero)

Pada dasarnya usaha-usaha yang dilaksanakan oleh PT Pos Indonesia meliputi usaha pokok dan usaha penunjang serta aneka layanan dan pelayanan usaha pos.

1. Usaha pokok Pos terdiri dari :

a. Layanan Fisik
   1) Layanan Surat Pos
   2) Layanan Paket Pos
   3) Layanan Keuangan
   4) Layanan Filateli

b. Layanan elektronik dengan Wasantara-Net (W-NET) sebagai tulang punggungnya, untuk menyajikan fasilitas-fasilitas :
   1) Internet :
      a) Surat elektronik (E-MAIL)
      b) Warung Pos Elektronik (Warposnet)
      c) Internet untuk jaringan korporasi (Coorporate Net working)
   2) Elektronik Data Interchange (EDI) untuk membantu jaringan komunikasi berbagai data, antara lain :
      a) Surat bisnis elektronik (SBE) :
         - Direct mail
         - Weselpos elektronik
         - Advertansi elektronik
         - Internet hibrida

2. Usaha penunjang terdiri dari :

a. Penyewaan ruang atau tempat

b. Usaha transportasi

c. Freight and forwading

d. Belanja lewat pos

3. Berbagai layanan keagenan

Pelayanan jasa keagenan yang dilakukan oleh PT Pos Indonesia untuk kepentingan pihak ketiga), yang meliputi :

a. Penabungan dan pembayaran untuk Bank Tabungan Negara (BTN)

b. Takesra dan Kukesra

c. Pembayaran telepon

d. Pembayaran pajak-pajak

e. Pemotongan pensiun eks bank kreditur

f. Pembayaran pensiun TASPEN dan ASABRI

g. Penjualan benda untuk direktorat pajak

4. Layanan Pos terdiri dari :

a. Surat Pos

Merupakan layanan standar pengiriman berita yang tersedia semua kantor pos dengan tarif seragam, baik untuk perhubungan di dalam maupun di luar negeri Jenis surat pos antara lain : Surat, Kartu Pos, Warkat Pos, Barang cetakan, Majalah sekogram (braille) dan bungkusan.

b. Surat Kilat

Merupakan layanan kiriman Pos dalam negeri yang menjangkau seluruh Indonesia dengan skala prioritas kecepatan dalam penyaluran dan pengantarnya.

c. Surat Kilat Khusus (SKH)

Merupakan layanan yang terdokumentasi sebagai solusi tepat kiriman pos dalam negeri sehingga dapat dilakukan jejak guna mengetahui status kiriman Jaringan SKH tersebar di 22 kota di Indonesia dengan waktu tempuh 24 jam sampai 48 jam

d. Ratron

Merupakan layanan surat elektronik yang merupakan hibrida atau surat secara fisik dengan kombinasi transmisi data melalui jaringan telekomunikasi Hasil transper data berupa copy naskah asli akan diantar kepada alamat penerima.

e. Express Mail Service (EMS)

Merupakan layanan pengiriman berita atau barang sebagai solusi tepat kiriman pos internasional dengan fasilitas jejak lacak guna mengetahui status kiriman Jaringan EMS tersebar di 46 negara terkemuka dengan waktu tempuh antara satu sampai dengan tiga hari.

f. Ratron Simpati

Merupakan layanan surat elektronik untuk bebagai ucapan simpati Hasil transper data berupa pesan pribadi dalam bentuk surat ataupun kartu ucapan akan diantarkan ke alamat yang akan dituju.

g. Surat Bisnis Elektronik (SBE)

Merupakan layanan hibrida antara transmisi data elektronik dengan fisik surat pos. Jenis layanan ini sangat cepat untuk pengiriman surat atau berbagai jenis tagihan dalam jumlah besar sehingga merupakan solusi korespondensi misal : Layanan SBE sementara baru terdapat disentral pengolahan pos Jakarta.

h. Wesel Pos

Merupakan layanan transper uang sebagai solusi kiriman uang keseluruh Indonesia. Tersedia beberapa jenis layanan tambahan untuk wesel pos yang terdiri dari :

1) Wesel Kilat
2) Wesel Kilat Khusus
3) Wesel pos elektronik (Westron)
4) Wesel pos berlangganan
5) Wesel pos luar negeri ke dari beberapa Negara

i. Giro Pos

Merupakan layanan keuangan untuk penampungan, penyimpanan dan pembayaran berbagai transaksi, baik untuk pemegang rekening perorangan maupun perusahaan atau keperluan bisnis di seluruh Indonesia.

j. Cek Pos Wisata (CPW)

Merupakan layanan keuangan sebagai dana perjalanan karena dapat di uangkan di semua kantor pos. Tersedia beberapa harga nominal CPW mulai dari Rp 10.000,00 sampai dengan Rp 25.000,00. Beberapa hotel,

travel biro dan tempat-tempat lainnya yang telah menerima CPW sebagai alat pembayaran.

k. Paket Pos

Merupakan layanan untuk pengiriman barang yang dapat dilakukan di semua kantor pos baik untuk perhubungan domestik maupun internasional, terdiri dari :

1) Paket pos darat atau laut untuk perhubungan darat atau laut
2) Paket pos udara untuk perhubungan udara

l. Filateli

Merupakan upaya peningkatan kualitas dan memperkaya kazanah hobi mengumpulkan perangko atau filateli, telah dikembangkan pula produk-produk filateli yang lebih atraktif dengan tema penerbitan bervariasi. Filateli adalah benda koleksi yang banyak diminati para penggemarnya, maka usaha bisnis filateli telah ditangani oleh satu divisi agar lebih fleksibel dan akrab dalam melangkah bersama filateli dalam masyarakat.

m. Belanja Lewat Pos (BLP)

Merupakan solusi belanja jarak jauh berbagai produk Manfaat bagi konsumen adalah mendapatkan produk-produk pilihan dengan harga yang sama diseluruh Indonesia. Deksripsi dan ilustrasi produk digelar dalam satu brosur yang diterbitkan secara berkala BLP dapat langsung mengakses pasar nasional tanpa harus membangun jaringan distribusi sendiri.

n. Pos Plus

Merupakan layanan dengan nilai tambah yang dikemas melalui sarana pelayanan pos plus sehingga layanan pos lebih "*customized*" sesuai dengan kebutuhan pelanggan, terdiri dari :

1) Kiriman hari ini sampai (KHIS)
2) Kiriman esok sampai (KES)
3) Penangan khusus atas kiriman

o. Wasantara Net (W-NET)

Merupakan layanan pertukaran informasi melalui internet sebagai solusi komunikasi baik untuk lingkup dalam maupun luar negeri.

p. Pos Serba Ada (Poserba)

Merupakan pengembangan fasilitas pelayanan fisik kantor pos dengan mengacu pada konsep "*one stop shopping*". Hadir untuk melayani tuntas segala kebutuhan tentang pos yang dikemas dalam tatanan arus untuk memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi setiap pengunjung yang datang. Poserba menyediakan semua kebutuhan yang berhubungan dengan pos dan berbagai alat tulis termasuk kartu ucapan dan benda filateli dalam kemasan khusus Poserba berada baik di kantor pos maupun di tempat yang lain yang strategis.

q. Pos Pemasaran Keliling

Merupakan perekayasaan kapasitas layanan pengantar pos yang lain selain mengantarkan kiriman pos juga ditambah dengan pelayanan kebutuhan pos lainnya seperti penjualan benda pos dan materai, penerimaan kiriman

pos, dan lain-lain sehingga lebih mendekatkan kepada layanan pos pada masyarakat. Posarling hadir mengunjungi masyarakat setiap hari dengan sepeda motor dan seragam khas serta di lengkapi dengan bunyi melodi yang menandai kehadiran porsaling yang siap untuk memberikan layanan pos.

r. Hallo Pos 161

Merupakan kemudahan untuk dapat menghubungi kantor pos melalui saluran pos melalui saluran telepon yang praktis yang diwujudkan dalam Hallo Pos 161 yang merupakan media informasi dan layanan pos Pelayanan ini bertujuan agar pelanggan hemat waktu dan biaya serta merupakan upaya untuk selalu dekat dengan jangkauan pelayanan pos.

4.1.5 Kebijakan Akuntansi Perusahaan

Kebijakan akuntansi yang diterapkan di dalam lingkungan PT Pos Indonesia (Persero) ditetapkan dengan Keputusan Direksi Nomor : 68A/Kug/Dirut/1998 tanggal 24 April 1998 tentang Kebijakan Akuntansi PT Pos Indonesia (Persero) yang mulai diberlakukan dalam penyusunan laporan keuangan tahun buku 1998. Kebijakan akuntansi ini merupakan penyempurnaan atas Keputusan Direksi Perusahaan Umum Pos dan Giro yang ditetapkan dengan keputusan Direksi Nomor : 73/Kug/Dirutpos/1992 tanggal 20 Juni 1992, sekaligus sebagai upaya penyesuaian terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia(IAI).

Beberapa kebijakan akuntansi yang ditetapkan tersebut antara lain:

1. Prinsip Penyajian Laporan Keuangan

   Laporan keuangan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia. Yang terdiri atas : neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan.

   Laporan keuangan disajikan dengan menggunakan pengukuran nilai historis dan atau nilai wajar sesuai dengan perundang – undangan atau Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku umum di Indonesia.

   Laporan keuangan disusun berdasarkan basis akrual (*accual basic*), kecuali laporan arus kas. Laporan arus kas disusun berdasarkan konsep kas dan setara kas dengan metode tidak langsung (*indirect method*).

   Mata uang yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan adalah Rupiah.

2. Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan, yaitu harga barang dan jasa serta seluruh biaya yang terjadi sampai aktiva tetap siap digunakan, kecuali pajak-pajak yang dikreditkan, khusus aktiva tetap tanah harga perolehannya meliputi biaya-biaya pembebasan, biaya pematangan, sedangkan aktiva yang diperoleh dengan membangun sendiri dicatat berdasarkan harga perolehan yang terdiri dari seluruh biaya pembangunan hingga siap untuk digunakan baik biaya langsung maupun biaya tidak langsung

   Penyusutan aktiva tetap dilakukan selama umur ekonomis (masa manfaat), untuk aktiva tetap bangunan seperti gedung, kantor dan rumah dinas menggunakan metode garis lurus *(straight line method)*, sedangkan untuk aktiva tetap bukan bangunan seperti kendaraan bermotor dan inventaris maka

penyusutannya menggunakan prosentase nilai buku (*double declining balance method)* yang diterapkan secara konsisten dari period ke periode.

Penarikan aktiva tetap dilakukan sebagai akibat kondisi fisik yang sudah tidak memungkinkan lagi aktiva tetap untuk beroperasi atau ada pergantian atas aktiva tetap tersebut maka nilai buku aktiva tetap yang ditarik (dihapus bukukan) diakui sebagai beban non usaha periode berjalan. Penarikan aktiva tetap dilakukan setelah mendapat izin dari pejabat berwenang di dalam perusahaan tersebut.

Aktiva tetap yang dimiliki oleh PT Pos Indonesia (Persero) terdiri dari :

1. Tanah
2. Gedung kantor
3. Rumah dinas
4. Kendaraan bermotor
5. Inventaris
6. Mesin – Mesin
7. Aktiva dalam proses

Dari ketujuh jenis aktiva tetap tersebut yang secara langsung dapat memberikan kontribusi terhadap perolehan pendapatan adalah gedung kantor, kendaraan bermotor dan inventaris.

Pelaksanaan investasi aktiva tetap tersebut dibiayai oleh perusahaan sendiri serta bantuan dari pemerintah. Aktiva tetap yang diperoleh dari pemerintah disebut dengan aktiva tetap “Pelita”. Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih jelas

tentang kedua sumber investasi tersebut, maka penulis akan membahas sebagai berikut :

1. Investasi Yang Dibiayai Perusahaan

Investasi yang dilakukan oleh perusahaan sendiri, dananya berasal dari bagian laba yang dicadangkan dan sebagian dari pinjaman. Biasanya investasi ini lebih tepat sasaran karena pengadaannya benar – benar sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Terjadinya pengeluaran untuk investasi dalam aktiva tetap ini dimulai dengan usulan investasi yang dianjurkan oleh masing-masing UPT berdasarkan usulan tersebut. Pejabat yang berwenang akan melakukan studi kelayakan terhadap usulan investasi tersebut. Jika dianggap layak, maka usulan tersebut akan disetujui kemudian usulan investasi dai UPT tersebut direkap di kantor Wilpos untuk dijadikan usulan investasi dari Wilpos tersebut dan kemudian akan dikirim ke kantor pusat.

Setelah usulan investasi dari seluruh Wilpos diterima oleh kantor pusat akan diadakan pembahasan antar direktorat anggaran dan akuntansi serta para staff perusahaan yang terkait. Hasil pembahasan tingkat staff tersebut disampaikan dan dibahas lebih lanjut pada tingkat direksi dan hasilnya merupakan usulan investasi PT Pos Indonesia (Persero) yang akan dibahas dengan dewan pengawas perusahaan.

Hasil pembahasan antara dewan direksi dengan dewan pengawas perusahaan akan dibahas dalam pra rapat umum tahun pengesahan anggaran (RUPTA) setelah pra rapat RUPTA akan diadakan lagi pembahasan oleh tim

teknis yang terdiri dari Sekjen Deparpostel, Dirjen Postel, Kepala Giro, Dewan Direksi serta staff perusahaan. Selanjutnya hasil pembahasan tim teknis tersebut akan menjadi bahan dalam rapat umum tahunan pengawas anggaran, rapat umum tahunan pengawas anggaran tersebut dipimpin langsung oleh Menteri yang akan mengesyahkan rencana kerja dan anggaran tersebut dengan KeputusanMenteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi.

Melihat proses terjadinya investasi dalam aktiva tetap tersebut diatas diharapkan apa yang diusulkan tersebut merupakan hal yang benar – benar dapat digunakan untuk menunjang kelancaran operasi perusahaan. Dari kegiatan itu diharapkan perusahaan mampu meraih laba secara optimal.

2. Investasi Yang Dibiayai Oleh Pemerintah

Aktiva tetap yang diperoleh dari pemerintah disebut dengan aktiva tetap Pelita, misalnya gedung pelita, peralatan pelita dan lain sebagainya. Pelaksanaan investasi ini dimulai dengan pembuatan konsep daftar usulan proyek (DUP) pelita PT Pos Indonesia (Persero) yang dibuat utuk tiap – tiap provinsi. Setelah konsep DUP selesai disempurnakan oleh tim perencanaan, selanjutnya diteruskan kepada Ditjen Postel dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga proyek yang bersangkutan menerima DUP untuk dilaksanakan.

Untuk melaksanakan proyek tersebut, Menparpostel menunjuk pimpinan dan bendaharawan proyek yang personilnya diambil dari jajaran Kanwil Parpostel setempat atau apabila mungkin ditunjuk pegawai PT Pos Indonesia (Persero). Setelah proyek selesai pimpinan proyek menyereahkan aktiva tetap

hasil proyek Pelita tersebut kepada PT Pos Indonesia (Persero) melalui surat keputusan. Penyerahan proyek secara fisik kepada PT Pos Indonesia (Persero) dilakukan oleh pimpinan proyek dengan berita acara penyerahan untuk segera dioperasikan. Ketetapan formal atas bantuan pemerintah untuk menjadi tambahan modal pemerintah adalah berdasarkan peraturan pemerintah (PP) ketetapan formal ini diperlukan untuk kepastian hokum dari kepemilikan aktiva tetap tersebut.

4.2 Pembahasan Penelitian

4.2.1 Analisis Perkembangan Investasi Aktiva Tetap pada PT Pos Indonesia (Persero)

Investasi merupakan penanaman dana yang dilakukan oleh perusahaan kedalam suatu asset dengan harapan memperoleh pendapatan dimasa yang akan datang. Salah satu jenis investasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk memperlancar proses operasinya adalah investasi pada aktiva tetap. Keputusan mengenai investasi dalam aktiva tetap sangat menentukan keberhasilan perusahaan. Hal ini terjadi karena menyangkut dana yang besar dan berlangsung dalam periode yang lama. Aktiva tetap dipakai untuk menjalankan operasi perusahaan dalam jangka waktu yang cukup lama setidak-tidaknya lebih dari satu tahun bahkan untuk beberapa perusahaan terdapat aktiva tetap yang dipergunakan dalam jangka waktu yang lebih dari 10 tahun. Sehingga dengan demikian dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap merupakan investasi jangka panjang.

Jumlah dana yang diinvestasikan dalam aktiva tetap tidak sama jumlahnya selama periode investasi atau selama umur penggunaan aktiva tetap tersebut. Jumlah dana yang terikat dalam aktiva tetap akan berangsur-angsur berkurang seseuai dengan metode penyusutan yang digunakan.

PT Pos Indonesia (Persero) Bandung menggunakan metode penyusutan saldo ganda menurun (*double declining balance method*) untuk aktiva tetap kelompok bukan bangunan.

a. Kelompok 1 : harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk kelompok bangunan yang mempunyai masa manfaat tidak lebih dari empat tahun, tarif penyusutannya sebesar 50% per tahun.
b. Kelompok 2 : harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk kelompok bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari empat tahun dan tidak lebih dari delapan tahun, tarif penyusutannya sebesar 25% per tahun.
c. Kelompok 3 : harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk kelompok bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari delapan tahun dan tidak lebih dari enam belas tahun, tarif penyusutannya sebesar 12,5% per tahun.
d. Kelompok 4 : harta yang dapat disusutkan dan tidak termasuk kelompok bangunan yang mempunyai masa manfaat lebih dari enam belas tahun dan tidak lebih dari dua puluh tahun, tarif penyusutannya sebesar 10% per tahun.

Sedangkan untuk kelompok bangunan menggunakan metode garis lurus (*straight line method*). Kelompok bangunan ini meliputi bangunan permanen dan harta tidak bergerak lainnya yang termasuk tambahan perbaikan dan perubahan yang dilakukan. Tarif penyusutannya ditetapkan sebesar 5% per tahun.

Berikut ini penulis sajikan perkembangan investasi aktiva tetap bersih setelah dikurangi akumulasi penyusutan yang terdapat pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung dari tahun 2000 - 2007.

Tabel 4.1
Perkembangan Investasi Aktiva Tetap
PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2000 – 2007

(dalam rupiah)

Tahun	Investasi Aktiva Tetap	Perkembangan	
		Selisih (Rp)	Persentase (%)
2000	360.355.928.100	-	-
2001	356.840.574.091	(3.515.354.009)	(0,98)
2002	382.596.695.116	25.756.121.025	7,22
2003	401.814.648.379	19.217.953.263	5,02
2004	389.684.120.370	(12.130.528.009)	(3,02)
2005	357.791.408.969	(31.892.711.401)	(8,18)
2006	344.830.510.519	(12.960.898.450)	(3,62)
2007	571.670.855.014	226.840.344.495	65,78

Sumber : Laporan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Bandung

Data-data dari tabel diatas apabila digambarkan dalam bentuk grafik, maka akan tampak seperti grafik dibawah ini :



Gambar 4.2
Grafik perkembangan Investasi Aktiva Tetap Tahun 2000-2007
PT Pos Indonesaia (Persero) Bandung
Sumber : Laporan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Bandung

Berdasarkan tabel dan grafik perkembangan investasi aktiva tetap diatas, maka investasi aktiva tetap pada PT Pos Indonesia (Persero) mengalami fluktuasi. Investasi aktiva tetap perusahaan pada tahun 2000 adalah sebesar Rp 360.355.928.100 sedangkan pada tahun 2001 mengalami penurunan yaitu senilai Rp 3.515.354.009 atau sebesar 0,98% dari tahun 2000 sehingga investasi aktiva tetap yang dilakukan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 356.840.574.091. Hal ini disebabkan masih adanya masa adaptasi dalam perusahaan dengan menggunakan sistem baru dan struktur organisasi yang baru sehingga kebijakan pengalokasian dana masih belum lancar sebagaimana yang diharapkan perusahaan. Pada tahun 2002 - 2003 investasi aktiva tetap mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal itu disebabkan oleh adanya perbaikan perencanaan penanaman investasi

dalam aktiva tetap oleh pihak perusahaan, jumlah investasi aktiva tetap pada tahun 2002 menjadi Rp. 382.596.695.116 dan pada tahun 2003 menjadi Rp 401.814.648.379 dengan tingkat perkembangan sebesar 7,22% untuk tahun 2002 dan 5,02% untuk tahun 2003.

Pada tahun 2004 - 2006 investasi aktiva tetap mengalami penurunan kembali yang cukup signifikan. Pada tahun 2004 terjadi penurunan sebesar Rp. 12.130.528.009 atau sebesar 3,02% sehingga jumlah investasi aktiva tetap menjadi Rp. 389.684.120.370. Penurunan yang paling besar terjadi pada tahun 2005 yaitu sebesar Rp. 31.892.711.401 atau 8,18% sehingga jumlah investasi aktiva tetap yang ada pada tahun 2005 menjadi senilai Rp. 357.791.408.969 sedangkan pada tahun 2006 investasi aktiva tetap menurun sebesar Rp. 12.960.898.450 atau sebesar 3,62% sehingga jumlah investasi aktiva tetap pada tahun 2006 sebesar Rp. 344.830.510.519. Hal itu disebabkan adanya kebijakan baru dari pihak manajemen dalam hal pengalokasian dana untuk investasi aktiva tetap karena perusahaan memerlukan dana yang cukup besar untuk membayar kewajiban jangka panjangnya sehingga perusahaan mengurangi jumlah pembelian aktiva tetap.

Berbeda dengan tahun 2007, investasi aktiva tetap mengalami kenaikan yang berarti yaitu sebesar Rp. 226.840.344.495 atau sebesar 65,78% sehingga jumlah investasi aktiva tetap pada tahun 2007 menjadi sebesar Rp 571.670.855.014. Hal ini dikarenakan pihak manajemen PT Pos Indonesia (Persero) melaksanakan revaluasi atas sebagian aktiva tetapnya secara bertahap. Tujuannya yaitu untuk memperbaiki struktur keuangan perusahaan yang pada

tahun 2007 telah mengalami akumulasi kerugian yang cukup besar. Melalui revaluasi aktiva tetap diyakini akan dapat mengkompensasi akumulasi kerugian dan sekaligus memulihkan rugi fiskal tahun-tahun sebelumnya, sehingga struktur keuangan PT Pos Indonesia (Persero) akan menjadi lebih fleksibel dan mempermudah dalam melakukan berbagai aksi korporasi guna meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

4.2.2 Analisis Perkembangan Arus Kas pada PT Pos Indonesia (Persero)

Manajer keuangan membuat keputusan untuk memastikan bahwa perusahaan memiliki dana yang memadai untuk memenuhi kewajiban keuangannya ketika jatuh tempo serta untuk mendapatkan keuntungan dari peluang investasi. Laporan arus kas adalah alat yang berharga bagi manajer keuangan atau kreditor untuk mengevaluasi penggunaan dana oleh perusahaan dan dalam menetapkan bagaimana perusahaan mendanai berbagai penggunaan tersebut. Tujuan utama dari laporan arus kas adalah untuk melaporkan arus kas masuk dan arus kas keluar dalam perusahaan yang dipisahkan ke dalam tiga aktivitas yaitu : operasi, investasi dan pendanaan.

Ketika suatu perusahaan menjual aktiva tetapnya (disinvestasi) karena dirasa sudah tidak memberikan manfaat lagi bagi perusahaan, maka disinvestasi aktiva tetap ini menghasilkan arus kas yang positif. Tetapi harus diingat bahwa investasi dalam aktiva tetap dan modal kerja menghasilkan kas negatif, karena perusahaan menggunakan kas untuk mendapatkan asset-asset tersebut. Sebaliknya

ketika perusahaan melakukan disinvestasi atau menjual asset-asset ini, perusahaan merealisasikan arus kas positif.

Setelah memperhitungkan semua arus kas masuk dan keluar, laporan penerimaan kas dan pengeluaran kas digabungkan untuk mendapatkan arus kas masuk bersih dan arus kas keluar bersih pada setiap periodenya.

Laporan arus kas PT Pos Indonesia (Persero) berdasarkan konsep kas dan setara kas menggunakan metode tidak langsung (*indirect method*). Adapun komponen arus kas yang terdapat pada PT Pos Indonesia (Persero) yaitu sebagai berikut :

1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi
    a. Laba Bersih Setelah Pajak
    b. Penyesuaian Laba Berdasarkan Arus Kas
2. Arus Kas dari Kegiatan Investasi
    a. Tanah
    b. Gedung
    c. Kendaraan Bermotor
    d. Inventaris
    e. Investasi Jangka Panjang
    f. Aktiva Dalam Proses
3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan
    a. Penambahan Modal
    b. Hutang Jangka Panjang
    c. Hutang Lancar Lainnya

d. Cadangan Pembagian Laba

e. Sisa Laba Ditahan

f. Pembagian Laba Tahun Lalu

g. Sewa Dimuka Jangka Panjang

4. Kenaikan/Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas
5. Saldo Awal Kas dan Setara Kas Awal Tahun
6. Saldo Akhir Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Untuk memperoleh saldo akhir kas dan setara kas akhir tahun maka digunakan rumus seperti dibawah ini :

Laporan Arus Kas = (Kas Bersih Aktivitas Operasi + Kas Bersih Aktivitas Investasi + Kas Bersih Aktivitas Pembiayaan) + Kas Awal Periode

Sumber : Wibowo dan Abubakar (2003:127)

Dengan menggunakan rumus diatas maka dapat diperoleh laporan arus kas PT Pos Indonesia (Persero) untuk periode tahun 2000 – 2007 dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa laporan arus kas PT Pos Indonesia (Persero) untuk periode tahun 2000 – 2007 adalah bernilai positif dan mengalami fluktuasi. Perubahan tersebut diakibatkan oleh adanya perubahan arus kas masuk dan arus kas keluar yang dilakukan oleh perusahaan karena aktivitas operasi, aktivitas investasi dan aktivitas pembiayaan.

Berikut ini penulis sajikan jumlah perkembangan arus kas bersih per tahun yang terdapat pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung dari tahun 2000 - 2007.

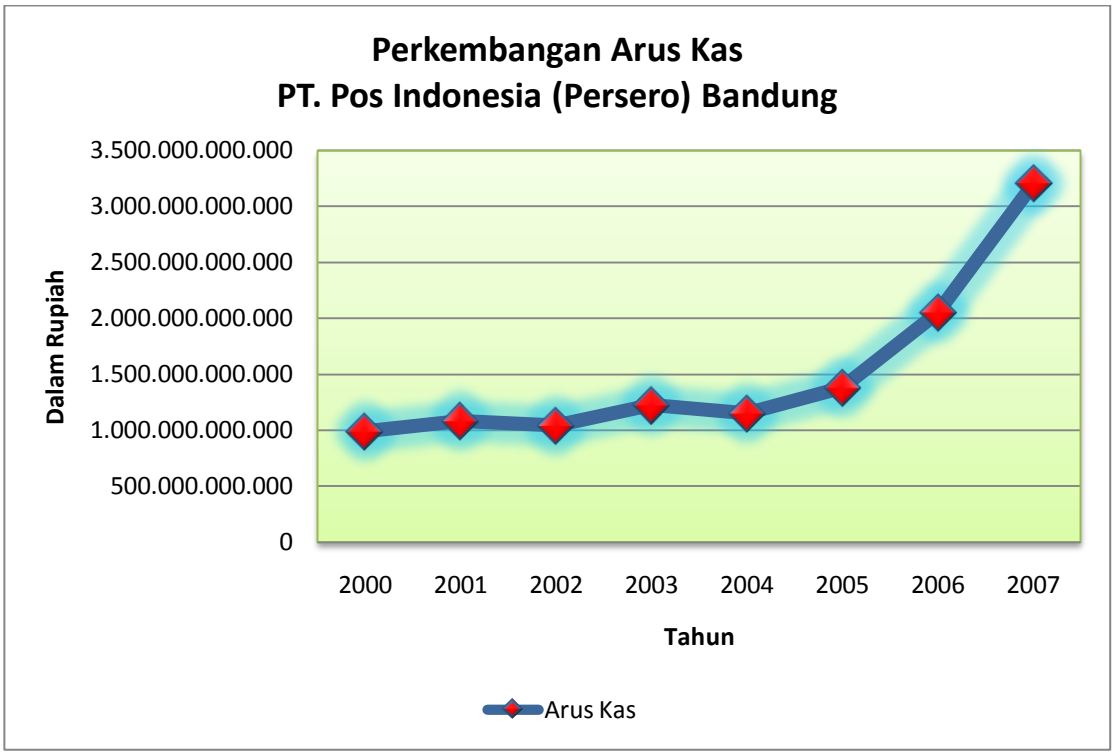
Tabel 4.3
Perkembangan Arus Kas
PT Pos Indonesia (Persero) Tahun 2000 – 2007

(dalam rupiah)

Tahun	Arus Kas	Perkembangan	
		Selisih (Rp)	Persentase (%)
2000	991.092.514.255	-	-
2001	1.085.675.081.824	94.582.567.569	9,54
2002	1.041.656.945.470	(44.018.136.354)	(4,05)
2003	1.223.165.004.183	181.508.058.713	17,42
2004	1.153.529.859.422	(69.635.144.761)	(5,69)
2005	1.381.179.054.265	227.649.194.843	19,74
2006	2.051.431.212.710	670.252.158.445	48,53
2007	3.196.540.996.680	1.145.109.783.970	55,82

Sumber : Laporan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Bandung

Data-data dari tabel diatas apabila digambarkan dalam bentuk grafik, maka akan tampak seperti grafik dibawah ini :



Gambar 4.3
Grafik Perkembangan Arus Kas Tahun 2000-2007
PT Pos Indonesaia (Persero) Bandung
Sumber: Laporan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Bandung

Dari tabel dan grafik diatas dapat dilihat bahwa arus kas pada PT Pos Indonesia (Persero) Bandung dari tahun ketahun mengalami perubahan. Pada tahun 2000 -2001 arus kas perusahaan meningkat dari Rp. 991.092.514.255 menjadi Rp. 1.085.657.081.824 dengan perkembangan sebesar Rp. 94.582.567.569 atau sebesar 9,54%. Sedangkan arus kas tahun 2002 mengalami penurunan sebesar Rp. 44.018.136.354 atau sebesar 4,05% sehingga pada tahun 2002 jumlah arus kas adalah sebesar Rp 1.041.656.945.470. Hal itu disebabkan karena adanya pembayaran hutang jangka panjang yang telah jatuh tempo sehingga mengurangi arus kas bersih yang masuk ke perusahaan. Pada tahun 2003 arus kas mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp. 181.508.058.713 atau sebesar

17,42% sehingga jumlah arus kas bersih yang diterima oleh perusahaan adalah sebesar Rp 1.223.165.004.183. Itu terjadi karena perusahaan menerima pembayaran piutang dari karyawan usaha yang cukup untuk menutupi kerugian tahun – tahun sebelumnya.

Pada tahun 2004 terjadi kembali penurunan yang cukup besar pada arus kas perusahaan yaitu sebesar Rp. 69.635.144.761 atau sebesar 5,69% sehingga arus kas pada tahun tersebut adalah sebesar Rp 1.153.529.859.422. Hal itu terjadi karena pada tahun ini perusahaan mengalami kerugian fiskal akibat dari penurunan nilai investasi.

Sedangkan dari tahun 2005 - 2007 arus kas perusahaan mengalami kenaikan yang sangat besar, hal ini disebabkan karena peningkatan pendapatan yang berasal dari aktivitas operasi dan investasi. Perusahaan melakukan evaluasi di berbagai bidang guna meningkatkan laba dan menutupi kerugian di tahun – tahun sebelumnya. Adapun jumlah peningkatannya tahun 2005 yaitu sebesar Rp. 227.649.194.843 atau sebesar 19,74% sehingga arus kas menjadi Rp. 1.381.179.054.265. Pada tahun 2006 kenaikan sebesar Rp. 670.252.158.445 atau sebesar 48,54% sehingga arus kas menjadi Rp Rp 2.051.431.212.710 dan pada tahun 2007 kenaikan arus kas sebesar Rp 1.145.109.783.970 atau sebesar 55,83% sehingga arus kas perusahaan menjadi Rp. 3.196.540.996.680.

4.2.3 Analisis Investasi Aktiva Tetap dan Dampaknya Terhadap Arus Kas Pada PT Pos Indonesia (Persero)

Adapun perhitungan untuk variabel X dan variabel Y, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.4
Variabel X dan Variabel Y

(Dalam Rupiah)

Tahun	Investasi Aktiva Tetap (X)	Arus Kas (Y)	X.Y (000.000.000)	X^2 (000.000.000)	Y^2 (000.000.000)
2000	360.355.928.100	991.092.514.255	357.146.062.807.323	129.856.394.916.812	982.264.371.812.297
2001	356.840.574.091	1.085.675.081.824	387.412.919.474.370	127.335.195.317.594	1.178.690.383.293
2002	382.596.695.116	1.041.656.945.470	398.534.504.781.449	146.380.231.113.685	1.085.049.192.045
2003	401.814.648.379	1.223.165.004.183	491.485.616.065.290	161.455.011.651.939	1.496.132.627.458
2004	389.684.120.370	1.153.529.859.422	449.512.268.589.392	151.853.713.668.541	1.330.631.136.578.140
2005	357.791.408.969	1.381.179.054.265	494.173.999.863.945	128.014.692.332.022	1.907.655.579.940.360
2006	344.830.510.519	2.051.431.212.710	707.396.072.373.401	118.908.080.984.794	4.208.370.020.480.820
2007	571.670.855.014	3.196.540.996.680	1.827.369.324.659.360	326.807.566.472.438	10.217.874.343.456
∑	**3.165.584.740.558**	**121.24.270.668.809**	**5.113.030.768.614.530**	**1.290.610.886.457.830**	**22.406.667.655.065.000**

Sumber : Laporan Keuangan PT Pos Indonesia (Persero) Bandung

Keterangan:

N = 8

∑x = 3.165.584.740.558

∑ y = 121.24.270.668.809

ΣXY = 5.113.030.768.614.530.000.000.000

Σ X² = 1.290.610.886.457.830.000.000.000

ΣY² = 22.406.667.655.065.000.000.000.000

Untuk menguji secara stasistika maka digunakan langkah-langkah atau urutan dalam menghitung data tersebut. Adapun langkah yang dimaksud adalah:

1. Analisis Regresi Sederhana

Regeresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Teknik statistik regresi digunakan untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (Investasi Aktiva Tetap) dan variabel dependen (Arus Kas) yang diteliti apakah mempunyai hubungan yang kuat atau lemah. Persamaan analisis regresi linear adalah:

$$\mathbf{Y = a + bX}$$

Sumber : Sugiyono (2007: 261)

Dimana :

Y = Arus Kas PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.

X = Investasi Aktiva Tetap PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.

a = Satuan Bilangan Konstanta

b = Koefisien regresi variabel dependen

Dari data-data yang ada pada tabel-tabel diatas, kemudian dihitung untuk menghasilkan rumus regresi. Dalam rumus regresi tersebut, peneliti mencari koefisien-koefisien a dan b. Nilai a dan b dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Untuk menentukan nilai a dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$a=\frac{(\Sigma y)(\Sigma x^2)-(\Sigma x)(\Sigma xy)}{n\,(\Sigma x^2)-(\Sigma x)^2}$$

$$a = \frac{(121.24.270.668.809)(1.290.610.886.457.830.000.000.000) - (3.165.584.740.558)(5.113.030.768.614.530.000.000.000)}{8(1.290.610.886.457.830.000.000.000) - (3.165.584.740.558)^2}$$

$$a = \frac{15.647.715.715.526.200.000.000.000.000.000.000.000 - 16.185.732.179.129.700.000.000.000.000.000.000.000}{10.324.887.091.662.600.000.000.000 - 10.020.926.749.653.700.000.000.000}$$

a = $\frac{-538.016.463.603.485.000.000.000.000.000.000.000}{303.960.342.008.951.000.000.000}$

a = -1.770.021.904.988

Untuk menentukan nilai b dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$b=\frac{n(\Sigma xy)-(\Sigma x)(\Sigma y)}{n(\Sigma x^2)-(\Sigma x)^2}$$

b = $\frac{8\ (5.113.030.768.614.530.000.000.000) – (3.165.584.740.558)(121.24.270.668.809)}{8\ (1.290.610.886.457.830.000.000.000) - (3.165.584.740.558)^{2}}$

b = $\frac{40.904.246.148.916.200.000.000.000 – 38.380.406.219.576.700.000.000.000}{10.324.887.091.662.600.000.000.000 – 10.020.926.749.653.700.000.000.000}$

b = $\frac{2.523.839.929.339.520.000.000.000}{303.960.342.008.951.000.000.000}$

b = 8,303

Apabila dilakukan perhitungan dengan menggunakan SPSS 15.0 *For Windows* maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.5
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1770021904988	999764905020,563		-1,770	,127
	Investasi Aktiva Tetap	8,303	2,489	,806	3,336	,016

a Dependent Variable: Arus Kas

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana di atas, diperoleh nilai a = -1770021904988 dan b = 8,303. Maka dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

$$Y = -1770021904988 + 8{,}303X$$

artinya nilai a dan b tersebut adalah :

a = -1770021904988 ini mempunyai arti bahwa jika tidak ada investasi aktiva tetap, maka arus kas akan sebesar = -1770021904988

b = 8,303 ini mempunyai arti bahwa setiap perubahan investasi aktiva tetap sebesar satu rupiah akan diikuti dengan perubahan arus kas sebesar = 8,303.

Sehingga dari rumus diatas dapat diartikan bahwa apabila investasi aktiva tetap mengalami perubahan sebesar satu rupiah, maka arus kas akan berubah sebesar Rp. 8,303. Dan apabila tidak ada investasi aktiva tetap, maka arus kas menurun sebesar Rp. 1.770.021.904.988.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Sofyan Syafri Harahap (2008:258) yang mengatakan bahwa:

> Dengan melakukan analisis arus kas kita dapat mengetahui pengaruh investasi baik kas maupun bukan kas dan transasksi lainnya terhadap posisi keuangan perusahaan selama satu periode tertentu. Laporan perubahan posisi keuangan dapat berupa laporan arus kas dan perubahan modal kerja.

2. Analisis Korelasi

Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan dua variabel, yaitu antara variabel *independen* dan variabel *dependen*. Adapun korelasi yang digunakan dalam analisis ini korelasi *Pearson product Moment*, teknik korelasi ini digunakan untuk mencari hubungan dan membuktikan hipotesis hubungan dua variabel bila kedua variabel terbentuk interval atau ratio, dan sumber data dari dua variabel atau lebih adalah sama. Rumus yang digunakan adalah rumus koefisien korelasi (*r*) yaitu:

$$r = \frac{n\sum XY - \left(\sum X\right)\left(\sum Y\right)}{\sqrt{\left\{n\left(\sum X^2\right) - \left(\sum X\right)^2\right\}\left\{n\left(\sum Y^2\right) - \left(\sum Y\right)^2\right\}}}$$

Sumber : Sugiyono (2007 : 228)

Keterangan:

r = Koefisien Korelasi

n = Jumlah Data

X = Variabel Independen (Investasi Aktiva Tetap)

Y = Variabel Dependen (Arus Kas)

Dari data hasil penelitian diperoleh nilai-nilai :

N = 8

∑x = 3.165.584.740.558

∑ y = 121.24.270.668.809

ΣXY = 5.113.030.768.614.530.000.000.000

Σ X² = 1.290.610.886.457.830.000.000.000

ΣY² = 22.406.667.655.065.000.000.000.000

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$r = \frac{n\,(\Sigma xy) - (\Sigma x)(\Sigma y)}{\sqrt{\{n(\Sigma x^2) - (\Sigma x)^2\}\{n(\Sigma y^2) - (\Sigma y)^2\}}}$$

$$r = \frac{8\left(5.113.030.768.614.530.000.000.000\right) - \left(3.165.584.740.558\right)\left(121.24.270.668.809\right)}{\sqrt{\left\{8\left(1.290.610.886.457.830.000.000.000\right) - \left(3.165.584.740.558\right)^2\right\}\left\{8\left(22.406.667.655.065.000.000.000.000\right) - \left(121.24.270.668.809\right)^2\right\}}}$$

$$r = \frac{40.904.245.148.916.200.000.000.000 - 38.380.406.219.576.700.000.000.000}{\sqrt{\left\{10.324.887.091.662.600.000.000.000 - 10.020.926.749.653.700.000.000.000\right\}\left\{179.253.314.240.520.000.000.000 - 146.997.993.250.542.000.000.000\right\}}}$$

$$r = \frac{2.523.839.929.339.520.000.000.000}{\sqrt{\left\{303.960.342.008.951.000.000.000\right\}\left\{32.255.401.989.977.900.000.000.000\right\}}}$$

$$r = \frac{2.523.839.929.339.520.000.000.000}{\sqrt{9.804.363.020.509.910.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000}}$$

$$r = \frac{2.523.839.929.339.520.000.000.000}{3.131.191.949.000.000.000.000.000}$$

r = 0,806

Sedangkan perhitungan dengan menggunakan SPSS 15.0 *For Windows* maka diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 4.6
Correlations

		Investasi Aktiva Tetap	Arus Kas
Investasi Aktiva Tetap	Pearson Correlation	1	,806(*)
	Sig. (2-tailed)	.	,016
	N	8	8
Arus Kas	Pearson Correlation	,806(*)	1
	Sig. (2-tailed)	,016	.
	N	8	8

* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Untuk mengetahui tingkat hubungan koefisien korelasi digunakan pedoman interpretasi korelasi sebagai berikut:

Tabel 4.7
Pedoman Untuk Memberikan Interpretasi terhadap Koefisien Korelasi

Besarnya Nilai	Tingkat Hubungan
0,00-0,199	Sangat rendah
0,20-0,399	Rendah
0,40-0,599	Sedang
0,60-0,799	Kuat
0,80-1.000	Sangat kuat

Sumber: Sugiyono (2007:231)

Dengan demikian korelasi yang didapat sebesar 0,806. Nilai korelasi tersebut bila mengacu pada interpretasi nilai korelasi menunjukan hubungan yang sangat kuat (0,80 – 1,000) antara investasi aktiva tetap dengan arus kas, jadi antara investasi aktiva tetap dengan arus kas hubungannya erat berdasarkan data pengamatan tahun 2000-2007.

3. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar presentase investasi aktiva tetap dan dampaknya terhadap arus kas PT Pos Indonesia (Persero) Bandung.

Dari nilai korelasi dapat diperoleh nilai investasi aktiva tetap dan dampaknya terhadap arus kas. Perhitungan dengan menggunakan rumus koefisien determinasi sebagai berikut :

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Sumber : J.Sarwono (2005 : 481)

Dimana :

Kd = Koefisien determinasi

r = Koefisien korelasi yang dikuadratkan

Maka perhitungannya adalah sebagai berikut :

Kd = $(0,806)^2$ x 100 %

Kd = 0,649636 x 100 %

Kd = 64,96 % atau dibulatkan menjadi 65%

Perhitungan dengan menggunakan *SPSS 15.0 for windows* didapatkan hasil sebagai berikut :

Tabel 4.8
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,806(a)	,650	,591	485186476914,417

a Predictors: (Constant), Investasi Aktiva Tetap

Berdasarkan perhitungan koefisien determinasi dan SPSS 15.0 *For Windows* diperoleh nilai Kd sebesar 65 %. Angka tersebut mempunyai arti bahwa sebesar 65 % arus kas dipengaruhi oleh investasi aktiva tetap sedangkan 35% dipengaruhi oleh faktor-faktor penyebab lainnya yang tidak diteliti diantaranya : aktivitas operasi dan aktivitas pendanaan perusahaan.

4. Rancangan Pengujian Hipotesis

Untuk melihat hasil dari pengujian hipotesis yang dikemukakan oleh peneliti, digunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Menentukan Hipotesis Statistik

Berdasarkan pada alat statistik yang digunakan dan dihipotesis penelitian maka penulis menetapkan hipotesis statistik yang digunakan untuk uji statistiknya yaitu hipotesis nol (H_0) yang diformulasikan untuk ditolak dan hipotesis alternatif (H_1) yaitu hipotesis yang diformulasikan untuk diterima dengan perumusan sebagai berikut:

$H_0 : \rho = 0$, Investasi aktiva tetap tidak berdampak terhadap arus kas PT Pos Indonesia (Persero).

$H_1 : \rho \neq 0$, Investasi aktiva tetap berdampak terhadap arus kas PT Pos Indonesia (Persero)

b. Menetapkan Tingkat Signifikan

Pengambilan keputusan berdasarkan angka signifikan menurut tingkat signifikansi dapat ditentukan dengan melakukan pengujian terhadap dua pihak untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis.

Menurut Andi Supangat (2006:313) menyatakan bahwa:

> Untuk mengambil kesimpulan diterima atau ditolaknya kesimpulan sementara (hipotesis), pada masalah sosial dan ekonomi seringkali menggunakan taraf nyata (tingkat ketidakpercayaan) antara 1%, 5% dan 10%. Atau dengan kata lain bahwa pengamatan dilakukan dengan tingkat keyakinan (*convidence level*) antara 99%, 95% dan 90%. Selanjutnya batas – batas pengamatan ini dijadikan sebagai batas nilai – nilai kritis untuk menolak atau menerima hipotesis dengan ketentuan seperti diatas

c. Uji Hipotesis (Uji t)

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data rasio dan sampel yang digunakan merupakan sampel kecil ($n \geq 30$), maka uji hipotesis yang digunakan adalah uji t. Tujuan dari uji t itu sendiri adalah untuk mengetahui signifikan atau tidaknya pengaruh antara variabel *independent* terhadap variabel *dependent*. Untuk menguji diterima atau ditolaknya hipotesis, maka dilakukan dengan cara pengujian dua pihak dengan tingkat signifikan = 5%. Dengan taraf signifikan $\propto = 0{,}05$ (5%) dimana df = n-2

df = n-2 = 8 - 2 = 6, maka diperoleh $t_{tabel} = \pm 2{,}447$

Untuk mengetahui nilai t hitung digunakan rumus sebagai berikut :

$$t = \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Sumber: Sugiyono (2007 : 230)

Didapatkan :

$$t_{hitung} = \frac{0{,}806\sqrt{8-2}}{\sqrt{1-(0{,}806)^2}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0{,}806\sqrt{6}}{\sqrt{1-0{,}649636}}$$

$$t_{hitung} = \frac{0{,}806(2{,}449489743)}{\sqrt{0{,}350364}}$$

$$t_{hitung} = \frac{1{,}974288733}{0{,}591915534}$$

t_{hitung} = 3,335423079 dibulatkan menjadi = 3,336

Perhitungan dengan menggunakan *SPSS 15.0 for windows* didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 4.9
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1770021904988	999764905020,563		-1,770	,127
	Investasi Aktiva Tetap	8,303	2,489	,806	3,336	,016

a Dependent Variable: Arus Kas

d. Menentukan Kriteria Penerimaan Hipotesis

Kriteria penerimaan hipotesis dapat ditentukan dengan membandingkan antara t_{hitung} dan t_{tabel} yang dapat dilihat dibawah ini :

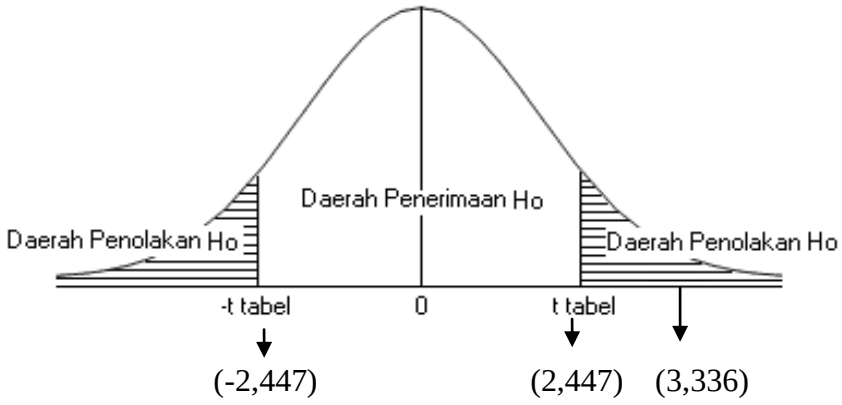
a. jika nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ada d daerah penerimaan, berarti Ha ditolak artinya investasi aktiva tetap tidak berdampak terhadap arus kas.

b. jika nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ada d daerah penolakan, berarti Ha diterima artinya terdapat dampak investasi aktiva tetap terhadap arus kas.

Dari hasil perhitungan diketahui $t_{hitung} > t_{tabel}$ 3,336 >2,447). Artinya H_O ditolak dan H_1 diterima, ini menjelaskan bahwa investasi aktiva tetap berdampak sescara signifikan terhadap arus kas PT Pos Indonesia (Perseo).

e. Menggambarkan Daerah Penerimaan dan Penolakan

Dibawah ini akan digambarkan kriteria penerimaan hipotesis dengan kurva daerah penerimaan dan penolakan sebagai berikut :



Gambar 4.4
Kurva t Distribusi (Uji Dua Pihak)

Dalam gambar terlihat bahwa ternyata nilai t hitung berada pada daerah penolakan Ho. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa investasi aktiva tetap berdampak secara signifikan terhadap arus kas. Artinya jika terjadi peningkatan investasi aktiva tetap maka arus kas akan mengalami kenaikan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gina Meilina Syarifah yang berjudul Pengaruh Investasi Aktiva Tetap Terhadap Arus Kas Pada PT Telekomunikasi Indonesia (2009;58) yang menyatakan bahwa investasi aktiva tetap memiliki arah korelasi yang positif yang tergolong rendah terhadap arus kas yaitu sebesar 0,365 dengan korelasi determinasi 13,3%. Ini berarti bahwa hanya 13,3% saja investasi aktiva tetap mempengaruhi arus kas sedangakan sisanya diperngaruhi oleh faktor lain seperti *profit margin*, *total asset turnover*, dan lain sebagainya.

Hal ini disebabkan karena PT Pos Indonesia (Persero) bergerak di bidang jasa sehingga sangat memerlukan investasi aktiva tetap dalam berbagai bentuk, seperti: bangunan, kendaraan dan peralatan lainnya. Selain itu dengan adanya investasi aktiva tetap pada PT Pos Indonesia (Persero) dapat meningkatkan produktivitas perusahaan sehingga arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar menjadi lebih lancar.